

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP TAX AVOIDANCE**
(Studi pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)

**INSTITUTIONAL OWNERSHIP, MANAGERIAL OWNERSHIP, AND AUDIT COMMITTEE TO TAX
AVOIDANCE**
(Study of Otomotif Companies Listed in Indonesian Stock Exchange 2010-2014)

Endang Endari Mahulae¹, Dudi Pratomo², Annisa Nurbaiti³

^{1,2,3} Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹endangmahulae@students.telkomuniversity.ac.id, ²dudipratomo@telkomuniversity.ac.id,

³annisanurbaiti@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperkecil beban pajak terutang dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan dan perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara sehingga praktik penghindaran pajak sangat tidak diharapkan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang tentunya akan merugikan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada subsector otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Metode analisis yang digunakan adalah pengujian statistik deskriptif dan analisis regresi data panel menggunakan *Eviews* versi 8.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax avoidance*, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit

Abstract

Tax Avoidance is an effort to avoid the tax which is done by taxpayer to minimize amount of deferred tax expense by utilizing the law and taxation. Taxes are the biggest revenue source of state, so that practice of tax avoidance is strongly discourage by the government. But in fact, there are so many tax avoidance case done by companies that will make state get loss.

This study aims to determine the effect of institutional ownership, managerial ownership and audit committee on tax avoidance simultaneously and partially in the automotive subsector listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2010-2014. The analytical method is testing of descriptive statistics and panel data regression analysis using *E-views* version 8.

The results showed that institutional ownership gives positive effect significantly and audit committee gives negative effect significantly on tax avoidance. While managerial ownership has no significant influence on tax avoidance.

Keywords: *Tax avoidance*, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Audit Committee

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan dan penerimaan negara terbesar yang kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga penerimaan pajak akan sangat diharapkan oleh pemerintah. Namun pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu berjalan dengan baik. Hambatan utama dalam penerimaan pajak adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Tandean, 2014). Hal tersebut merupakan bentuk perlawanan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang.

Sari (2013:54) mengatakan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan beban pajak terutang yang dilakukan secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana metode yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan

perpajakan, sedangkan *tax evasion* (penyelundupa pajak) merupakan upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara *illegal* dengan cara menyembunyikna keadaan yang sebenarnya, tindakan tersebut jelas melanggar hukum.

Tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan akan sangat diperlukan untuk mengurangi adanya tindakan praktik penghindaran pajak. Konsep dan prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) harus diterapkan guna menciptakan tata kelola yang baik dalam sebuah perusahaan. *Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Sutedi, 2011:7). Tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan posisi daya saing perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, mengelola risiko dan efiseinsi perusahaan. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan. Dalam kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang mealkukan praktik penghindaran pajak yang melibatkan pimpinan perusahaan di dalamnya sebagai pengambil keputusan, dimana pemimpin perusahaan tersebut memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya (Swingly dan Sukartha, 2015).

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui kondisi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. 2) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. 3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial yaitu: a) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. b) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. c) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. 4) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014.

2. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut undang-undang No.16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bab 1 pasal 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Tax Avoidance

a. Pengertian Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aan bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Sari, 2013:51).

b. Penyebab Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance

Alasan yang menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaan pajak adalah penghasilan utama wajib pajak ditujukan untuk memneuhi kebutuhan pribadinya, hal tersebut mengakibatkan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Keuntungan dari tindakan oajak agresif yaitu, penghematan pajak, baik langsung dan tidak langsung keuntungan bagi manajer yang mendapatkan kompensasi dari pemegang saham (Chen et al, 2008).

c. Pengukuran Tax Avoidance

Dalam penelitian ini penulis menggunakan proksi *Book Tax Difference* (BTD), yang merupakan kesenjangan atau perbedaan anatara laba komersial yang dlaporkan dalam laba rugi menurut peraturan perpajakan negara yang bersangkutan (Bovi, 2005). *Total Book Tax Difference* (BTD) dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Total } \text{BTD} = \frac{\text{EBIT} - \text{Laba Kena Pajak}}{\text{Total aset}}$$

2.3 Corporate Governance

a. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *corporate governance*. Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan erusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. tujuan pemisahaan tugas tersebut agar pemilik peusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin (Sutedi, 2011:13). Jensen da Meckling (1976) menyebutkan bahwa manajer sebuah perusahaan sebagai agenda pemegang saham sebagai principal. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Sutedi, 2011:7)

b. Pengertian Coorporate Governance

Noensi (Sutedi, 2011:1) berpendapat bahwa *Good Corporate Governance* adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, taat pada aturan hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai sosial budaya yang tinggi. *Corporate governace* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan itern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka dengan kata lain suatu sistem yang menagtur dan mengendalikan perusahaan (Sutedi, 2011:7).

c. Pengukuran Corporate Governance

1) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lsin (Tarjo, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Shleifer dan Vishney (1986) mengatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran yang sangat penting dalam memantau , mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusa , maka pemilik institusional memiliki isentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hasil penelitian oleh Khurana dan Moser (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan. Kepemilikan Institusional dapat dihitung dengan menggunakan rasio

$$\text{Kepemilikan Institusinal} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

2) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manarial perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih gait untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adanya dirinya sendiri. Pohan (2008) mengatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan, dikarenakan hal tersebut membantu menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer. Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan menggunakan rasio:

$$\text{Kepemilikan Manjerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

3) Komite Audit

Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) telah mengatur keberadaan komite audit pada suatu perusahaan melalui Keputusan No.Kep-29/PM/2004 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Meteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara (bagi BUMN). Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit terdiri dari sukurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan dua anggota lainnya yang berasal dari luar emiten dan komite audit tersebut bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Variabel ini diukur dengan menggunakan variable *dummy*. Jika perusahaan memiliki komite audit sedikitnya 3 akan diberi kode 1 sedangkan jika perusahaan memiliki komite audit kurang dari 3 akan diberi kode 0.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Untuk memperoleh sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria yang menjadi dasar pemilihan sampel adalah perusahaan otomotif yang *listing* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) secara konsisten pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama tahun 2010-2014, memiliki data lengkap mengenai informasi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit selama tahun 2010-2014, tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan pajak selama tahun 2010-2014. Terdapat 9 sampel perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana:

- Y** = Tax Avoidance
- α** = Konstanta
- X_1** = Komisaris Independen
- X_2** = Komite Audit
- X_3** = Kualitas Audit
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$** = Koefisien Regresi
- ϵ** = Error Term

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap *tax avoidance* yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Terdapat 13 perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI, namun berdasarkan kriteria *purposive sampling* yang telah ditentukan terdapat 9 perusahaan yang dapat dijadikan sampel.

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah analisis deskriptif setiap variabel operasional

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	BTD	KEP_INST	KEP_MANJ	KOM_AUD
Mean	0.035441	70.93044	4.550444	0.933333
Maksimum	0.202272	95.65000	28.88000	1.000000
Minimum	-0.049917	45.24000	0.00000	0.000000
Standar Deviasi	0.0599514	17.40177	8.721192	0.252262

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2016

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari *tax avoidance* adalah sebesar 0.035441 dan standar deviasi sebesar 0.0599514. standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan tingginya simpangan data variabel *tax avoidance* selama periode pengamatan. Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 70.93044 dan standar deviasinya sebesar 17.40177. standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa rendahnya simpangan data variabel kepemilikan institusional selama periode pengamatan. Nilai rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 4.550444 dan standar deviasinya sebesar 8.721192. standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingginya simpangan data variabel kepemilikan manajerial selama periode pengamatan. Nilai rata-rata komite audit sebesar 0.933333 dan standar deviasinya sebesar 0.252262. standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa rendahnya simpangan data variabel kepemilikan institusional selama periode pengamatan.

4.2 Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel

a. Uji Fixed Effect (Uji Chow)

Tabel 2. Hasil Uji *Fixed Effect*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	25.976599	(8,33)	0.0000
Cross-section Chi-square	89.438053	8	0.0000

Sumber: *Output Eviews 8.0* (data yang telah diolah)

Berdasarkan hasil uji signifikansi *fixed effect*, diperoleh nilai probabilitas *cross section Chi-square* sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% dan nilai probabilitas *cross section F* sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% maka H_1 diterima atau penelitian ini menggunakan metode *fixed effect*. Selanjutnya melakukan pengujian antara metode *fixed effect* dengan *random effect* dengan menggunakan uji Hausman.

b. Uji *Random Effect* (Uji Hausman)

Tabel 3. Hasil Uji *Rancom Effect*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.822632	3	0.0032

Sumber: *Output Eviews 8.0* (data yang telah diolah)

Berdasarkan hasil uji Hausmann, diperoleh nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0.0032 yang menunjukkan lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0.05. Sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan H_0 ditolak atau penelitian ini menggunakan metode *fixed effect model*.

4.3 Persamaan Regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian metode yang telah dilakukan, maka dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam regresi data panel adalah metode *fixed effect*. Berikut merupakan hasil uji metode *fixed effect*.

Tabel 4. Model *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INST	0.005709	0.001244	4.587791	0.0001
MANJ	0.009370	0.006668	1.405222	0.1693
KOA	-0.042424	0.017091	-2.482242	0.0183
C	-0.372530	0.096192	-3.872780	0.0005

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.874932	Mean dependent var	0.035441	
Adjusted R-squared	0.833242	S.D. dependent var	0.059514	
S.E. of regression	0.024303	Akaike info criterion	-4.373240	
Sum squared resid	0.019491	Schwarz criterion	-3.891464	
Log likelihood	110.3979	Hannan-Quinn criter.	-4.193639	
F-statistic	20.98689	Durbin-Watson stat	2.864353	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: *Output Eviews 8.0* (data yang telah diolah)

Model persamaan regresi data panel yang dibentuk dalam penelitian ini merupakan model *fixed effect*. Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta koefisien dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut: $TAX = -0.372530 + 0.005709 KEP_INST + 0.009370 KEP_MANJ - 0.042424 KOM_AUD$

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinansi sebesar 0.874932 atau 87.4932%. hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan

komite audit mampu menjelaskan variabel depende yaitu *tax avoidance* sebesar 87.4932% sedangkan sisanya yaitu 12,51% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.4.2 Uji Simultan (F)

Berdasarkan tabel 4, diperoleh bahwa nilai probabilitas (F-Statistic) sebesar $0.000000 < 0.05$ (taraf signifikansi 5%) maka H_0 ditolak yang artinya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.4.3 Uji Parsial (T)

Uji statistic t adalah uji yang menunjukkan atau menentukan signifikansi atau tidak signifikannya masing-masing nilai koefisien regresi secara terpisah terhadap variabel terkait. Berdasarkan Hasil uji *Fixed Effect* model dapat disimpulkan bahwa:

- Variabel kepemilikan institusional (X_1) memiliki nilai probabilitas (n-value) $0.0001 < 0.05$, sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan maka $H_{0.2}$ diterima yang berarti kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan memiliki arah yang positif.
- Variabel kepemilikan manajerial (X_2) memiliki nilai probabilitas (n-value) sebesar $0.1693 > 0.05$, sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan maka $H_{0.3}$ ditolak yang berarti kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
- Variabel komite audit (X_3) memiliki nilai probabilitas (n-value) sebesar $0.0183 < 0.05$, sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan maka $H_{0.4}$ ditolak yang berarti komite audit memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah yang negatif terhadap *tax avoidance*.

4.4.4 Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Variabel kepemilikan institusional (X_1) memiliki nilai probabilitas $0.0001 < 0.05$, sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan maka $H_{0.2}$ diterima yang artinya bahwa secara parsial kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap *tax avoidance*. *Book Tax Difference* memiliki sifat yang negatif yang artinya jika LTD yang dimiliki oleh sebuah perusahaan bernilai negatif maka perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional memiliki arah yang positif yang artinya mengurangi adanya tindakan penghindaran pajak dan semakin tinggi proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional maka akan mempengaruhi tindakan pajak agresif oleh perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Herawati (2013), Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance*.

4.4.5 Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance

Variabel kepemilikan manajerial (X_2) memiliki nilai probabilitas $0.1693 > 0.05$, sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan maka $H_{0.3}$ ditolak yang berarti kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Semakin besarnya proporsi kepemilikan saham oleh pihak manajemen maka akan mengurangi perilaku manajemen dalam mementingkan kepentingan diri sendiri. Dalam penelitian ini proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial lebih kecil dibanding dengan jumlah kepemilikan insitusional. Persentase kepemilikan manajerial masih jauh dari nilai rata-rata. Dimana nilai rata-rata untuk kepemilikan manajerial yaitu sebesar 4.550444, namun masih banyak perusahaan yang jumlah kepemilikan manajerialnya di bawah rata-rata yaitu sekitar 66,7%. Hal tersebut memungkinkan bahwa pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2010-2014.

4.4.6 Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Variabel komite audit (X_3) memiliki nilai probabilitas $0.0183 < 0.05$, sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan maka $H_{0.4}$ ditolak yang berarti komite audit memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah yang negatif terhadap *tax avoidance*. *Book Tax Difference* memiliki sifat yang negatif, yang artinya jika LTD yang dimiliki oleh sebuah perusahaan bernilai negatif maka perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian ini variabel komite audit memiliki arah yang negatif yang artinya menambah adanya tindakan praktik penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah komite audit dalam

perusahaan tidak menjamin komite audit dapat meminimalisasi praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Penambahan komite audit bisa saja dilakukan semata-mata untuk memenuhi peraturan pemerintah mengenai pedoman dan pembentukan komite audit. Latar belakang dan keahlian dalam bidang akuntansi juga mempengaruhi praktik penghindaran pajak, anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara menghindari risiko, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham (Puspita dan Harto, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014), Annisa dan Kurniasih (2012), Pranata dan Herawati (2013), Dewi dan Ketut (2014) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

5. Kesimpulan dan Saran

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dana analisis diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan *Tax Avoidance* dalam perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014:
 - a. Dari 45 sampel data terdapat 20 sampel data yang memiliki nilai kepemilikan institusional di atas rata-rata dan 25 sampel data yang memiliki nilai di bawah rata-rata.
 - b. Dari 45 sampel data terdapat 15 sampel data yang memiliki nilai kepemilikan manajerial di atas rata-rata dan 30 sampel data yang memiliki nilai di bawah rata-rata.
 - c. Dari 45 sampel data terdapat 42 sampel data perusahaan yang memiliki nilai komite audit di atas rata-rata dan 42 sampel data di bawah rata-rata.
 - d. Dari 45 sampel data terdapat 27 sampel data yang memiliki nilai *tax avoidance* di bawah rata-rata dan 18 sampel data yang memiliki nilai *tax avoidance* di atas rata-rata.
2. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen secara Simultan
Berdasarkan hasil penelitian, variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014.
3. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Secara Parsial
 - a. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap *tax avoidance*.
 - b. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
 - c. Komite Audit berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang negatif terhadap *tax avoidance*.
4. Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit mampu menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 87.4932% sedangkan sisanya yaitu 12,51% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan beberapa saran bagi penelitian selanjutnya yaitu: 1) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek penelitian pada emiten sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, seperti pada emiten sektor pertambangan, sektor keuangan, dan sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2) dalam penelitian selanjutnya dapat menambah atau menggunakan variabel lain yang kemungkinan memiliki pengaruh besar terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan saran bagi praktisi dan pengguna lainnya yaitu: 1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan peraturan perpajakan untuk mengurangi perusahaan dalam menghindari beban pajak dengan melakukan praktik *tax avoidance*, ada baiknya pihak fiskus meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan. 2) Bagi Perusahaan Otomotif yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, untuk manajemen diharapkan agar lebih menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan lebih memperhatikan segala tindakan dalam pengambilan keputusan dan risiko yang mungkin akan ditimbulkan dari tindakan tersebut. 3) Bagi investor hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dalam melakukan analisis laporan keuangan untuk memahami praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Daftar Pustaka:

- ^[1]Annisa, Nuralifmida A. dan Kurniasih, Lulus. (2012). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Vol. 8, (2), 95- 189, 2012. Jurnal Akuntansi dan Auditing.

- [2]Bovi, Maurizio (2005). *Book Tax Gap, An Income Horse Race*. Working Paper No. 61.
- [3]Chen, S., X. Chen, Q. Cheng, dan T. Shelvin. (2008). *Are Family Firms More Tax Aggressive than Nonfamily Firms?*. Working Paper, University of Washington.
- [4]Jensen, M. dan Meckling, W. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. No. XI. Pp. 5-50.
- [5]Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- [6]Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- [6]Khurana, I. K. dan W. J. Moser. (2009). *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. Didapat dari: www.ssrn.com.
- [7]Ngadiman dan Puspitasari, Christiany. (2014). *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Volume XVIII, No. 03, September 2014: 408-421. *Jurnal Akuntansi*.
- [8]Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 6.2 (2014) : 249-260.
- [9]Pohan, H. T. (2008). *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. Didapat dari : <http://hotmanpohan.blogspot.com>.
- [10]Pranata, Febri M., Dwi Fitri Puspa dan Herawati.(2014) "Pengaruh Karakter Eksekutif dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *Kumpulan Artikel Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Wisuda Ke 61 April 2014 E-Journal*.
- [11]Puspita, Silvia Ratih dan Puji Harto. 2014. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*. *Diponegoro Journal of Accounting ISSN (Online):2337-3806 Volume 3 No. 2*.
- [12]Sari, Diana (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- [13]Sheilfer, A., dan Vishney, R. 1986. *Large Shareholders and Corporate Control*. Vol 94, 461-488. *Journal of Political Economy*.
- [14]Sutedi, Adrian (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Salemba Empat
- [15]Swingly, Calvin., dan Sukartha, Made I. (2015). *Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Koite audit, dan Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- [16]Tandean, Vivi Adeyani. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank*.
- [17]Tarjo. 2008. "Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity capital". *Symposium Nasional akuntanus XI*. Pontianak.
- [18]Undang- Undang No. 28 tahun 2009 Tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [19]Winata, Fenny. (2014). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013*. Vol 4. *Tax & Accounting Review*.